



ADENDUM/PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DAN
PROGRAM KAMPUS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR: 1030/UN6.A/HK.07.00/2025 - ADD

NOMOR: W.11-HH.04.04-2595

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-05-2025)** bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Sigid Suseno, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 387/UN6.RKT/Kep/HK/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor - Sumedang 45363 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Asep Sutandar, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 27 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di provinsi Jawa Barat, yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. bahwa PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor: 02/I/NK/2022 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- d. Bahwa PARA PIHAK menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor: 143/DJPPI/HK.04.02/02/2023 dan Nomor: 2276/JN6.A/PKS/2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Dan Program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- e. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tridarma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

- (1) Ketentuan penamaan dari Instansi Pihak Kedua berubah dan disesuaikan dengan awal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat
- (2) Ketentuan perubahan penandatangan dari Pihak Pertama yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 387/UN6.RKT/Kep/HK/2024 dan Pihak Kedua yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024.

PASAL II

Sehubungan dengan Adendum Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini, semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama beserta yang tidak diubah dengan Adendum Perubahan ini dinyatakan tetap berlaku.

PASAL III

Adendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, pada tanggal sebagaimana tertera di atas.

PIHAK KESATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN,



PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT,

